KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

		FINAL/HUAR FINAL					
		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 3 3 6			H.4 X Final		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
		11.2 Tembetalan ke- v in Indiana.			III.5 IIII.6		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 15 499 276 2 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : HARYATI							
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	1.064.300	1.064.300	0	5	53.215	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mmyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instai	nsi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama Instan	si Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI KAL	IMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit C	Organisasi :						
C.4 Tanggal	:	2 3 dd 0 2 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penan	datangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan \	.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperi	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa dok	umen ini tela	ıh ditandatangani secara	

3BEYPQ7T